

DAFTAR TABEL

1	Landasan Yuridis KPBU.....	57
2	Regulasi pada sektor bidang infrastruktur.....	60
3	Regulasi terkait dengan penanaman modal.....	64
4	Karakteristik industri konstruksi.....	95
5	Perbedaan Pengadaan Barang/Jasa dan KPBU.....	121
6	Perbedaan Pengadaan Barang/Jasa dan KPBU dari aspek waktu.....	121
7	Tahapan pemilihan Penyedia Jasa dengan Tender.....	132
8	Syarat dokumen dalam <i>Bidding Document</i>	134
9	Perbedaan badan usaha jasa konstruksi dalam negeri dan badan usaha jasa konstruksi asing.....	143
10	Perbedaan pelaksanaan kontrak konstruksi di Indonesia dan Australia..	190
11	Alasan terjadinya sengketa.....	256
12	Ketentuan dalam kontrak ringkas FIDIC.....	308
13	Perkembangan penggunaan DAB secara internasional.....	313
14	Perbedaan Dewan Peninjauan Sengketa, Dewan Ajudikasi Sengketa dan Dewan Sengketa Gabungan.....	315

DAFTAR BAGAN

1	Ruang Lingkup Hukum Pemerintahan.....	22
2	Para pihak dalam kontrak konstruksi.....	147
3	Kontrak Konsesi dalam <i>Public Private Partnership</i>	153
4	Kontrak BOT dalam pelaksanaan <i>Public Private Partnership</i>	154
5	Urusan Pemerintahan.....	200
6	Alternatif Penyelesaian Sengketa Konstruksi di Indonesia.....	285

DAFTAR ISI

Halaman Depan	i
Keterangan Promotor dan KoPromotor.....	ii
Pernyataan Orisinalitas.....	iii
Lembar Pengesahan.....	iv
Penetapan Panitia Penguji Ujian Tahap I (Tertutup).....	v
Penetapan Panitia Penguji Ujian Tahap II (Terbuka).....	vi
Ucapan Terima Kasih.....	vii
Ringkasan.....	xii
<i>Summary</i>	xv
<i>Abstract</i>	xviii
Daftar Peraturan Perundang-undangan.....	xix
Daftar Tabel.....	xxi
Daftar Isi	xxiii

BAB I PENDAHULUAN

1. Latar Belakang.....	1
2. Rumusan Masalah.....	13
3. Tujuan Penelitian.....	13
4. Manfaat Penelitian.....	14
5. Orisinalitas Penelitian.....	15

6. Kerangka Teoritik.....	18
6.1. Teori Kewenangan.....	18
6.2. Teori Perizinan.....	21
6.3. Hukum Kerjasama Pemerintah.....	33
6.4. Hukum Kontrak.....	35
6.5. Tanggung Gugat Pemerintah.....	40
7. Metode Penelitian	45
8. Sistematika Penelitian.....	50

**BAB II KARAKTERISTIK KONTRAK PEMERINTAH DALAM
PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR**

1. Landasan Filosofis dan Landasan Yuridis Penyelenggaraan Kontrak Konstruksi.....	52
2. Prinsip Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur.....	72
3. Karakteristik Kontrak Konstruksi Pemerintah.....	91
4. Jenis Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur.....	98
5. Penyelenggaraan Kontrak PPP di Indonesia.....	122
6. Bentuk Kerjasama Pemerintah dengan BUJKA.....	155
7. Aspek-Aspek dalam Kontrak Konstruksi.....	166
8. Keberlakuan <i>Model Law</i> dalam Hukum Konstruksi.....	173
9. Perbandingan Kontrak Konstruksi.....	185

BAB III TANGGUNG GUGAT PEMERINTAH DALAM KONTRAK

KONSTRUKSI PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR

1. Hakikat Tanggung Gugat dalam Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur.....	193
2. Para Pihak yang Bertanggungjawab.....	198
3. Macam-macam Tanggung Gugat.....	212
4. Tanggung gugat Pemerintah menurut Hukum Administrasi, Hukum Perdata dan Hukum Pidana di Indonesia.....	216
5. Tanggung Gugat berdasarkan Hukum Konstruksi di Indonesia.....	232
6. Tanggung Gugat berdasarkan FIDIC.....	240

BAB IV PENYELESAIAN SENGKETA KONSTRUKSI DALAM KONTRAK PENYEDIAAN INFRASTRUKTUR ANTARA PEMERINTAH DENGAN BADAN USAHA ASING

1. Karakteristik Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur.....	244
2. Klausul Penyelesaian Sengketa Konstruksi.....	268
3. Model Penyelesaian Sengketa dalam Kontrak Konstruksi Penyediaan Infrastruktur.....	284

BAB V PENUTUP

1. Kesimpulan..... 328

2. Saran..... 330

DAFTAR BACAAN..... 331